



Indonesia Tak Baik-baik Saja

Para pengunjung rasa yang terdiri dari rombongan mahasiswa dan warga sipil menembus penjagaan aparat dan menggelar unjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, pada Rabu (28/10) siang, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Demonstrasi, meski mustahil menjatuhkan pemerintahan, dia menyebut harapan selalu ada di tangan masyarakat. Dengan demo, terpampang lah fakta jika Indonesia tak baik-baik saja. Berita terkait baca Hal.5.(ist.cnbcs)

Harga Jual Eceran (HJE) Minimum dan Tarif Cukai per Batang (2026)

Sigaret Kretek Mesin (SKM):

Golongan I ■ Rp 2.260 ■ Rp 1.231.

Golongan II ■ Rp 1.380 ■ Rp 746.

Sigaret Putih Mesin (SPM):

Golongan I ■ Rp 2.380 ■ Rp 1.336

Golongan II ■ Rp 1.485 ■ Rp 794

■ Harga Jual Eceran (HJE) Minimum per batang

■ Tarif Cukai per batang



ENDUS AROMA PERMAINAN CUKAI, KPK GELEDAH DJARUM

Kantor Bea dan Cukai Kudus Juga Disasar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor PT Djarum dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Kudus, Jawa Tengah, Rabu (28/10/2026). Komisi Anti-rasuah mendalami kemungkinan kickback atau pemberian uang kepada oknum Bea Cukai terkait pengurusan pita cukai, meski konstruksi perkara dan pihak yang bertanggung jawab belum diumumkan. Penyidik menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru pada Oktober 2026 dan mengamankan dokumen serta barang bukti elektronik dari penggeledahan tersebut. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan penyidikan masih berada pada tahap awal. Hingga berita ini dibuat, KPK belum menetapkan tersangka dalam penyidikan baru tersebut. Penggeledahan berlangsung di tengah pengembangan perkara dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang bermula dari operasi tangkap tangan pada Februari 2026. Dalam rangkaian perkara sebelumnya, KPK telah memproses delapan tersangka dari unsur pejabat Bea Cukai dan pihak swasta, termasuk pihak Blueray Cargo. Namun, KPK menegaskan penyidikan yang kini menyasar kantor Djarum berada di luar dua pengembangan perkara yang diumumkan pada 21 Juli 2026. Pihak Grup Djarum sendiri menyatakan akan menghormati proses hukum dan bersikap kooperatif. BERITA SELENGKAPNYA DI HAL.11.....

Sigaret Kretek Tangan (SKT):

Golongan I ■ Rp 2.170 ■ Rp 483

Golongan I (Bawah) ■ Rp1.555 - Rp2.170 ■ Rp 378

Golongan II ■ Rp 995 ■ Rp 223

Golongan III ■ Rp 725 ■ Rp 112

Regulasi Baru Pajak Rokok (PMK 26/2026)

Besaran Pajak

10% dari Cukai Rokok (dipungut bersamaan oleh Bea Cukai).

Kategori Wajib

Sigaret, cerutu, rokok daun, dan rokok elektrik (vape).

Bebas Pajak

Tembakau iris, molasses, tembakau hirup, dan tembakau kunyah (HPTL).

Alokasi APBD (50%):

- 37,5% dialokasikan untuk BPJS Kesehatan

- Minimal 7,5% dialokasikan untuk Pelayanan Kesehatan Daerah.

- Maksimal 5% dialokasikan untuk Penegakan Hukum Daerah.

DISULAP JADI PREMIUM, OPLOSAN 600 TON BERAS SUBSIDI DIJUAL RP17 RIBU/KG

Dugaan pengoplosan beras bersubsidi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) menjadi beras premium kembali mencuat. Dalam laporan awal Kementan, terdapat sekitar 600 ton beras SPHP yang diduga dioplos dan kemudian dijual dengan harga Rp17.000 per kilogram. Padahal, beras program pemerintah itu seharusnya dijual Rp12.500 per kilogram untuk membantu masyarakat memperoleh pangan dengan harga terjangkau.

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, mengungkap dugaan praktik tersebut di sebuah lokasi pengolahan atau pengemasan ulang beras di kawasan Kayumanis, Matraman, Jakarta Timur, Rabu (28/10/2026).

"(Ini yang dioplos beras) SPHP. Yang disubsidi pemerintah. Harusnya harganya ini Rp12.500 (per kg), dijual Rp17 ribu, dioplos. Jadi beras premium," kata Amran.

Amran menduga jumlah beras yang terlibat dalam praktik itu tidak berhenti pada 600 ton. Ia menyebut angka tersebut berasal dari laporan awal yang diterimanya dan memperkirakan volumenya dapat mencapai ribuan ton. Namun, jumlah keseluruhan beras yang diduga terlibat, nilai kerugian negara, serta lama praktik tersebut berlangsung belum dipastikan.

"Ini laporannya tadi saya terima 600 ton, tapi ini yang sekarang. Berarti sudah ribuan ton, ini," ujarnya.

Lokasi yang didatangi Amran berada di kawasan Kayumanis, Matraman. Di depan bangunan terdapat spanduk bertuliskan Toko/Rumah Beras Kayumanis, lengkap dengan gambar kemasan beras SPHP serta keterangan penjualan beras, minyak goreng, dan kebutuhan pokok lainnya. Sejumlah karung beras terlihat ditumpuk di dalam bangunan yang telah dipasang garis polisi.

Amran menyatakan pelaku telah ditangkap. Ia meminta kepolisian mengembangkan penyelidikan untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk jalur distribusi beras yang diduga berasal dari gudang Perum Bulog di Kelapa Gading. Informasi mengenai sumber beras tersebut masih perlu didalami oleh aparat.

Mekanisme pengoplosan dalam kasus ini juga belum diketahui secara pasti. Amran menjelaskan, salah satu modus yang biasa terjadi adalah mencampur beras SPHP dengan beras lain, kemudian memasarkannya menggunakan label premium. Namun, ia belum memastikan apakah cara tersebut digunakan dalam kasus di Kayumanis.

Persoalan utama dalam dugaan kasus ini bukan semata-mata selisih harga jual, melainkan kemungkinan penyalahgunaan program subsidi



Menteri Pertanian Amran Sulaiman saat melakukan sidak di Kayu Manis, Matraman, Jakarta Timur, Rabu (28/10/2026). (Dok. Kementerian Pertanian)

yang dirancang untuk menjaga keterjangkauan pangan.

Amran menyebut beras SPHP memperoleh subsidi pemerintah sekitar Rp6.000 per kilogram. Program tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah atau rumah tangga dalam kelompok desil 1 hingga 5.

"Ini adalah jatah beras untuk orang miskin. Kemudian ini barang disubsidi. Ini dioplos, dirampok ini," kata Amran.

Jika dugaan tersebut terbukti, beras yang semestinya dijual dengan harga terkendali justru dipasarkan sebagai produk premium dengan harga lebih tinggi. Praktik itu berpotensi mengurangi manfaat subsidi bagi kelompok sasaran sekaligus merugikan konsumen yang membeli beras dengan label dan harga yang tidak sesuai dengan asal maupun penanganan produknya.

Amran juga menyoroti besarnya anggaran subsidi pemerintah. Ia menyebut subsidi pemerintah pada 2026 mencapai Rp160 triliun, meningkat dari Rp144 triliun pada 2025. Menurut dia, dukungan pemerintah diberikan dari sisi hulu melalui sarana produksi pertanian, termasuk pupuk dan traktor, hingga sisi hilir melalui program beras SPHP yang disalurkan melalui Bulog.

"Dan ini disubsidi pemerintah. Tahu subsidi pemerintah berapa? Rp160 triliun tahun ini, subsidi. Dan paling besar di sektor beras, pangan. Tahun lalu Rp144 triliun. Tapi masih ada oknum yang bermain-main," ujarnya.

Besarnya anggaran tersebut

membuat pengawasan distribusi menjadi penting. Subsidi tidak cukup hanya dialokasikan dalam anggaran dan disalurkan melalui lembaga pemerintah. Pengawasan juga diperlukan untuk memastikan barang sampai kepada konsumen yang menjadi sasaran, dijual sesuai ketentuan, dan tidak dialihkan menjadi komoditas dengan harga lebih tinggi melalui praktik yang melanggar aturan.

Ada Sindikat Mafia Beras?

Amran menduga praktik pengoplosan tersebut tidak dilakukan secara individual. Ia meminta kepolisian menelusuri kemungkinan adanya jaringan yang menghubungkan pelaku dengan pihak lain dalam rantai pasok beras.

"Ini adalah bentuk pengkhianatan pada rakyat Indonesia. Ini ribuan ton. Ini mafianya yang oknum pengamat yang selalu cari mafianya, ini mafianya," kata Amran saat melakukan inspeksi mendadak di lokasi.

Dalam pernyataan lainnya, ia menegaskan dugaan adanya kelompok yang bekerja secara terorganisasi.

"Oh iya satu komplotan. Ini memang ada sindikasi, ada komplotan khusus mafia beras. Ini harus dibongkar seluruh Indonesia. Supaya konsumen, masyarakat bisa tenang. Ini kesempatan sekarang kita bongkar mafia pangan," ujarnya.

Amran menyebut perkara beras yang ditangani sepanjang 2025 hingga 2026 telah menjerat 102 tersangka. Namun, ia belum memastikan apakah kasus di Kayumanis berkaitan dengan perkara-perkara tersebut atau melibatkan jaringan yang sama.

Ia meminta aparat tidak berhenti pada pelaku yang telah ditangkap. Penyelidikan, menurut dia, harus menelusuri rantai pasok serta kemungkinan keterlibatan pihak internal yang memiliki akses terhadap distribusi beras bersubsidi.

"Kalau ada Bulog terlibat, sudah pasti dipecat dan juga ditindak," kata Amran.

Ia juga menegaskan akan memberhentikan pegawai Kementerian Pertanian maupun Bulog jika terbukti terlibat dalam praktik tersebut.

"Kalau ada dari Kementerian Pertanian Bulog ikut, saya pastikan saya pecat. Kalau sore ini aku tahu, hari ini aku tahu, saya tahu, sore saya pecat," tegasnya.

Amran meminta kepolisian mengusut perkara tersebut tanpa pandang bulu. Ia menyampaikan apresiasi kepada Kapolres Jakarta Timur, Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri, Kapolri, Kabareskrim, dan Kapolda atas penanganan kasus tersebut.

"Kalau kepolisian, Pak Kapolres, aku titip. Jangan pilih kasih," katanya. (tin,ist,dtc/dya)

Realita Harga Rata-Rata Beras di Pasar (28 Oktober 2026)

Beras Kualitas Bawah I
Rp14.950 - Rp15.950 / kg

Beras Kualitas Bawah II
Rp14.900 - Rp15.250 / kg

Beras Kualitas Medium I
Rp16.700 - Rp17.100 / kg

Beras Kualitas Medium II
Rp16.450 - Rp16.850 / kg

Beras Kualitas Medium III
Rp18.000 - Rp18.050 / kg

Beras Kualitas Super / Premium I
Rp18.000 - Rp18.050 / kg

Beras Kualitas Super / Premium II
Rp17.450 - Rp17.500 / kg



EMPAT RUU JADI PRIORITAS DPR, DARI SIBER HINGGA PERAMPASAN ASET

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menetapkan empat rancangan undang-undang (RUU) sebagai agenda penting pada Masa Persidangan II. Keempatnya meliputi RUU Keamanan dan Ketahanan Siber, RUU Masyarakat Adat, RUU Administrasi Kependudukan, dan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana. DPR menekankan pentingnya perlindungan hak warga, keamanan data pribadi, serta kepastian hukum dalam pembahasan regulasi tersebut.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan agenda itu dalam pidato peringatan 98 Tahun Sumpah Pemuda di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/10/2026). Dalam kesempatan tersebut, Dasco didampingi Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal.

"Pada Masa Persidangan II yang akan datang, terdapat empat agenda penting yang perlu kita kerjakan secara cermat dan saling terhubung," kata Dasco.

Salah satu agenda yang menjadi perhatian ialah RUU Perampasan Aset. Rancangan regulasi ini telah ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR dalam rapat paripurna pada 6 Oktober 2026. Pembahasannya diarahkan untuk memperkuat kemampuan negara menelusuri dan mengambil kembali hasil kejahatan, termasuk yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

"RUU Perampasan Aset terkait dengan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya yang telah menjadi usul inisiatif DPR, harus memungkinkan negara mengejar hasil kejahatan secara efektif, namun ia wajib berada dalam sistem peradilan pidana terpadu, selaras dengan KUHP dan KUHP nasional yang baru, serta menjunjung *due process of law*," ujar Dasco.

Ia menegaskan, pengaturan mengenai pembuktian, kontrol pengadilan, dan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik harus dirumuskan secara jelas. Menurut Dasco, upaya negara memberantas kejahatan tidak boleh mengabaikan prinsip keadilan maupun membuka ruang bagi tindakan sewenang-wenang.

"Pengaturan tentang pembuktian, kontrol pengadilan, dan perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik harus terang agar ketegasan tidak berubah menjadi kesewenang-wenangan," sambungnya.

Target pembahasan RUU Perampasan Aset sebelumnya telah diarahkan selesai paling lambat 15 Desember 2026. Pada 26 Oktober 2026, Ketua Komisi III DPR RI Habiburrahman menyatakan

DPR mempercepat agenda pembahasan, termasuk memajukan rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang semula dijadwalkan pada masa sidang berikutnya. Percepatan itu dimaksudkan agar masukan masyarakat dapat dihimpun sebelum proses legislasi memasuki tahapan selanjutnya.

Sementara itu, RUU Keamanan dan Ketahanan Siber diarahkan untuk memperkuat perlindungan infrastruktur digital nasional. Namun, Dasco mengingatkan bahwa penguatan keamanan siber harus disertai pembagian kewenangan yang tegas dan mekanisme pengawasan yang melindungi hak masyarakat.

"RUU Keamanan dan Ketahanan

Siber harus memperkuat daya tahan infrastruktur digital dengan pembagian kewenangan yang jelas dan pengawasan yang menjamin privasi, kebebasan berekspresi, serta batas peran aparat di ruang sipil," ujarnya.

Agenda berikutnya adalah RUU Masyarakat Adat. Dasco menekankan bahwa regulasi tersebut harus memberikan pengakuan terhadap masyarakat adat, wilayah, pengetahuan, serta hak kolektif mereka. Pengakuan itu, menurutnya, tidak boleh berhenti pada pendataan administratif yang menjadikan masyarakat adat sekadar objek pencatatan.

"RUU Masyarakat Adat harus

memastikan pengakuan masyarakat, wilayah, pengetahuan, dan hak kolektifnya, bukan menjadikan mereka sekadar objek pencatatan," kata Dasco. (gus,kim,rls/dya)

EMPAT RUU PRIORITAS DPR

RUU Keamanan dan Ketahanan Siber

- Memperkuat perlindungan infrastruktur digital nasional.
- Memperjelas pembagian kewenangan antar lembaga.
- Menjamin privasi dan kebebasan berekspresi.
- Membatasi peran aparat di ruang sipil.

RUU Masyarakat Adat

- Memberikan pengakuan terhadap masyarakat adat dan wilayah adat.
- Melindungi pengetahuan tradisional.
- Menjamin hak-hak kolektif masyarakat adat.
- Pengakuan tidak boleh sebatas pendataan administratif.

RUU Administrasi Kependudukan

- Menjamin setiap warga memperoleh identitas hukum.
- Memperluas akses terhadap pelayanan publik.
- Memperkuat perlindungan data pribadi dalam administrasi kependudukan.

UU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana

- Memungkinkan negara mengejar dan merampas hasil kejahatan, termasuk korupsi.
- Menjamin proses sesuai sistem peradilan pidana, KUHP, dan KUHP yang baru.
- Memperjelas mekanisme pembuktian dan kontrol pengadilan.
- Melindungi pihak ketiga yang beritikad baik.
- Mencegah penyalahgunaan kewenangan dan tindakan sewenang-wenang.
- Deadline pengesahan: paling lambat 15 Desember 2026.
- Pembahasan DIM bersama pemerintah dijadwalkan mulai masa sidang pada 10 November 2026.



Menurut Yusril, salah satu persoalan mendasar dalam pilkada langsung adalah besarnya biaya yang harus dikeluarkan kandidat untuk menjangkau pemilih. Biaya tersebut, dalam pandangannya, membuat kontestasi politik menjadi mahal dan berpotensi mendorong calon terpilih mencari cara untuk mengembalikan modal setelah menduduki jabatan. (tin,ist,kum/dya)

Yusril Ungkap Prabowo Berkali-kali Usulkan Pilkada Lewat DPRD

MENTERI Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto berkali-kali menyarankan agar pemilihan kepala daerah (pilkada) dikembalikan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Usulan itu berkaitan dengan tingginya biaya politik dalam pemilihan langsung yang dinilai membuka peluang

korupsi ketika calon terpilih mulai menjabat.

Yusril menyampaikan hal tersebut saat menghadiri peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 di Universitas Indonesia, Depok, Rabu (28/10/2026). Ia menilai terdapat kontradiksi dalam sistem politik yang berjalan saat ini, di satu sisi pemerintah dan masyarakat menyatakan menentang korupsi, tetapi di sisi lain mekanisme politik justru dinilai menciptakan peluang bagi praktik tersebut.

"Kita ini kan repotnya begini. Kita enggak suka sama korupsi, kita anti korupsi, tapi tanpa sadar kita membangun sistem yang membuka peluang terjadinya korupsi secara besar-besaran," kata Yusril kepada awak media.

Ia kemudian mengungkapkan pandangan Prabowo mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah. Menurut Yusril, Presiden beberapa kali menyampaikan bahwa pilkada sebaiknya tidak lagi dilakukan secara langsung oleh masyarakat, melainkan melalui DPRD.

"Pak Presiden saya itu berkali-kali mengatakan, 'Sudahlah, Pilkada itu kembalikan saja kepada DPRD.' Enggak mau kan?" ujar Yusril, mengutip pernyataan Prabowo.



YUSRIL IHZA MAHENDRA

Menteri Koordinator
Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia,
Imigrasi, dan Pemasyarakatan

DIBERI TENGGAT SEPEKAN, PEMDA WAJIB BENTUK SATGAS MBG

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memberikan waktu satu pekan kepada pemerintah daerah yang belum membentuk satuan tugas (satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG). Jika tenggat tersebut tidak dipenuhi, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengirimkan surat teguran dengan tembusan kepada DPRD setempat.

Tito menyampaikan tenggat itu setelah memimpin sosialisasi Surat Edaran (SE) Mendagri tentang Pelaksanaan Inspeksi dan Penilaian Kesesuaian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Daerah, di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Rabu (28/10/2026).

Dalam kesempatan tersebut, ia meminta pemerintah provinsi serta kabupaten/kota segera membentuk satgas untuk memperkuat pengawasan pelaksanaan program MBG.

"Saya meminta kepada yang belum, saya berikan waktu seminggu untuk membuat Satgas MBG di tingkat daerah provinsi, kabupaten, kota," ujar Tito.

Tito menyatakan, Kemendagri akan memeriksa daerah yang belum memenuhi permintaan tersebut setelah tenggat berakhir. Pemeriksaan melibatkan Inspektorat Jenderal Kemendagri bersama Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.

Pemerintah pusat juga akan mengumumkan daerah yang belum membentuk satgas dan menyampaikan surat teguran dengan tembusan kepada DPRD agar dapat ditindaklanjuti melalui fungsi pengawasan.

Data jumlah daerah yang telah membentuk satgas berbeda dalam pemberitaan pada hari yang sama. Kompas.com, mengutip data Kemendagri, menyebut sebanyak 223 daerah telah membentuk Satgas MBG. Sementara itu, Sumbarsatu melaporkan angka 230 daerah. Dengan total 552 pemerintah daerah yang terdiri atas 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota, kedua angka tersebut menunjukkan pembentukan satgas belum menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

Periksa 14 Indikator Kelayakan Dapur

Percepatan pembentukan satgas merupakan bagian dari upaya memperkuat pengawasan operasional SPPG atau dapur yang menyiapkan makanan bagi penerima manfaat MBG. Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut, Tito menerbitkan SE Nomor 400.5/8545/SJ tentang Pelaksanaan Inspeksi dan Penilaian Kesesuaian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Daerah.

Melalui surat edaran itu, gubernur, bupati, dan wali kota diminta memperkuat pengawasan terhadap



operasional SPPG sesuai kewenangan masing-masing. Satgas daerah diarahkan berkoordinasi dengan unsur Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan inspeksi dan penilaian kesesuaian dapur berdasarkan petunjuk teknis serta ketentuan yang ditetapkan BGN.

Pemeriksaan mengacu pada 14 indikator kelayakan operasional yang disiapkan BGN. Penilaian juga mencakup kualitas dan kesesuaian menu makanan serta evaluasi ketepatan sasaran penerima manfaat. Hasil inspeksi menjadi dasar untuk menentukan apakah suatu SPPG layak melanjutkan kegiatan, dapat beroperasi dengan perbaikan, atau tidak layak melanjutkan kegiatan.

Pelaksanaan pemeriksaan melibatkan perangkat daerah sesuai bidang tugasnya. Unsur yang dapat dilibatkan antara lain dinas kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan, serta inspektorat.

Keterlibatan lintas sektor diperlukan untuk memeriksa berbagai aspek operasional dapur, mulai dari kondisi fasilitas, pengelolaan makanan, hingga kualitas dan kesesuaian menu yang disajikan kepada penerima manfaat. Hasil pemeriksaan selanjutnya menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi mengenai kelayakan operasional masing-masing SPPG.

Selain inspeksi, pemerintah daerah diminta memantau pelaksanaan pelayanan MBG, termasuk kepuasan penerima manfaat. Evaluasi dapat dilakukan melalui penyebaran angket dengan melibatkan kepala sekolah dan komite

sekolah untuk memperoleh masukan mengenai pelayanan makanan di lingkungan pendidikan.

Hasil pengawasan dan pemantauan dilaporkan kepada BGN dengan tembusan kepada Kemendagri. Laporan tersebut mencakup hasil pemeriksaan serta rekomendasi status operasional SPPG berdasarkan indikator penilaian yang digunakan.

26 Ribu Dapur Jadi Tantangan

Kepala BGN Sudaryono mengatakan, pengawasan di tingkat daerah dibutuhkan untuk memperkuat koordinasi antara lembaga yang dipimpinnya dan unit pelayanan MBG yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Menurut Sudaryono, jumlah dapur yang telah mencapai lebih dari 26 ribu unit membutuhkan mekanisme pengawasan yang mampu menjangkau pelaksanaan program secara langsung. Rentang kendali antara BGN pusat dan SPPG menjadi salah satu persoalan yang perlu ditangani melalui penguatan koordinasi di tingkat provinsi serta kabupaten/kota.

"Untuk memastikan fungsi pengawasan dan fungsi customer service atau pengaduan itu prima," kata Sudaryono, sebagaimana pada Rabu (28/10/2026).

Ia menjelaskan, mekanisme pengaduan perlu diperkuat agar keluhan masyarakat mengenai pelaksanaan MBG dapat diterima dan ditindaklanjuti lebih cepat. Satgas daerah diharapkan menjadi penghubung antara pemerintah daerah dan BGN, terutama dalam pengawasan standar pelayanan,

TENTANG SATGAS MBG DI TIAP PEMDA

- **Tenggat Waktu Ketat:** Harus dibentuk dalam waktu 1 minggu berdasarkan SE Mendagri Nomor 400.5/8545/
- **Anggota Lintas Sektor:** Melibatkan berbagai OPD (Kesehatan, Pendidikan, PU, Pangan, Pertanian) dan diawasi unsur Inspektorat.
- **Kemitraan Pusat:** Bekerja sama langsung di lapangan dengan Badan Gizi Nasional (BGN).
- **Fokus Audit Dapur:** Menginspeksi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menggunakan 14 indikator kelayakan resmi.
- **Kontrol Kualitas:** Menjamin higienitas proses memasak, kesterilan kemasan, kecukupan gizi, dan menekan sisa makanan (food waste).
- **Evaluasi Penerima:** Memvalidasi data target (siswa, balita, ibu hamil) serta menyebarkan kuesioner evaluasi lewat sekolah.
- **Pemberdayaan Lokal:** Mewajibkan penyerapan bahan baku dari petani, peternak, dan nelayan di wilayah setempat.
- **Tiga Status Kelayakan:** Mengeluarkan rekomendasi hasil sidak berupa status Layak, Layak dengan perbaikan, atau Tidak layak.
- **Rapor Kepala Daerah:** Kinerja pembentukan dan pengawasan satgas ini menjadi indikator penilaian prestasi Pemda.



pemeriksaan kelayakan dapur, serta penanganan pengaduan.

Dengan mekanisme tersebut, pemerintah daerah diharapkan tidak hanya berperan dalam pembentukan struktur pengawasan, tetapi juga memastikan hasil pemeriksaan ditindaklanjuti. Penilaian terhadap fasilitas, kapasitas dapur, dan pelayanan makanan menjadi bagian dari upaya menjaga agar SPPG menjalankan operasional sesuai ketentuan.

Di luar fungsi pengawasan, Tito meminta pemerintah daerah memanfaatkan program MBG untuk mendukung perekonomian wilayah masing-masing. Menurut dia, kebutuhan bahan pangan untuk program tersebut berpotensi membuka pasar bagi petani dan nelayan, sekaligus mendorong aktivitas ekonomi lokal.

"Karena off-taker-nya jelas, pembelinya jelas, petani, nelayan, ini akan sangat diuntungkan," kata Tito.

Ia menilai, pelaksanaan MBG yang dikelola secara optimal berpotensi berkontribusi terhadap peningkatan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat, pertumbuhan ekonomi daerah, pengendalian inflasi, penurunan kemiskinan, serta penciptaan lapangan kerja. (gus,ist,kun,ktn/dya)

KOMDIGI WAJIBKAN TAKEDOWN KONTEN 4 JAM, KRITIK TERANCAM?

Kepmen Komdigi Nomor 127 Tahun 2026 mewajibkan platform digital memutus akses terhadap konten disinformasi dan ujaran kebencian yang dinilai mendesak paling lambat empat jam setelah menerima perintah. Ketidakjelasan batasan konten memicu kekhawatiran aturan ini berpotensi menyasar kritik.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menerbitkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 127 Tahun 2026 tentang penanganan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung disinformasi dan ujaran kebencian. Salah satu ketentuan yang menjadi sorotan ialah kewajiban penyelenggara platform digital memutus akses terhadap konten tertentu paling lambat empat jam setelah menerima perintah pemerintah.

Ketentuan tersebut ramai diperbincangkan di media sosial pada Rabu (28/10/2026), setelah isi keputusan menteri itu diunggah akun Instagram @lambe_turah. Sejumlah warganet mempertanyakan batasan ujaran kebencian yang menjadi dasar penindakan. Mereka khawatir ketentuan tersebut dapat digunakan secara berlebihan untuk membatasi kritik terhadap pemerintah.

Dalam diktum Kesatu, keputusan itu mengategorikan informasi

elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung muatan disinformasi dan/atau ujaran kebencian sebagai informasi yang meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum. Rumusan ini menjadi dasar bagi pelaksanaan penanganan konten sebagaimana diatur dalam diktum berikutnya.

Diktum Kedua mengatur kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat yang menyediakan layanan user-generated content untuk melaksanakan perintah pemutusan akses dari menteri terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memuat disinformasi dan/atau ujaran kebencian. Untuk konten yang bersifat mendesak dan harus ditangani sesegera mungkin, pemutusan akses wajib dilakukan paling lambat empat jam setelah perintah diterima.

Sementara itu, diktum Ketiga menetapkan bahwa kepatuhan penyelenggara sistem elektronik

dalam menangani konten tersebut diawasi melalui Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN). Dengan mekanisme ini, pemerintah memiliki instrumen untuk memantau pelaksanaan kewajiban moderasi konten oleh platform digital.

Meski demikian, perdebatan muncul mengenai batasan antara disinformasi, ujaran kebencian, dan kritik yang disampaikan masyarakat. Dalam kolom komentar unggahan @lambe_turah, seorang warganet dengan akun @nanda_nrs*** menyindir kecepatan pemerintah dalam menangani konten digital. "Gercep banget kalau urusan bungkam kritik, tapi urusan data bocor sama judi online bilanganya 'sedang ditelusuri,'" tulisnya.

Kritik lain menyoroti potensi multitafsir dalam penerapan keputusan tersebut. "Sebelumnya tolong @kemdigi jelaskan juga batasan ujaran kebencian itu seperti apa. jangan keluarin aturan karet yang bisa nyasar sana sini sesuai kepentingan Anda sendiri, alasannya melindungi

masyarakat nyatanya melindungi istana," tulis akun @okakurn**.

Kekhawatiran tersebut berkaitan dengan pentingnya membedakan ujaran kebencian yang menyerang atau mendiskriminasi kelompok tertentu dari ekspresi pendapat yang berisi kritik terhadap kebijakan publik. Kecepatan penghapusan konten memang dapat dibutuhkan untuk menangani ancaman yang mendesak, tetapi penerapannya juga memerlukan kriteria yang jelas agar tidak menimbulkan pembatasan berlebihan terhadap ekspresi yang sah.

Di sisi lain, keberadaan disinformasi dan ujaran kebencian di ruang digital merupakan persoalan yang perlu ditangani. Namun, efektivitas moderasi konten tidak hanya bergantung pada kecepatan pemutusan akses. Kejelasan definisi, transparansi alasan penindakan, serta mekanisme keberatan bagi pihak yang kontennya dihapus juga penting untuk mencegah kesalahan moderasi dan menjaga akuntabilitas. (tin,ist,ant/dya)

Disorot! TNI Dikerahkan Hadapi Demonstan

Pengerahan prajurit TNI untuk mengamankan demonstrasi di sejumlah titik Jakarta pada Rabu (28/10/2026) menuai kritik dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan. Koalisi menegaskan demonstran bukan ancaman militer dan mendesak pemerintah menarik prajurit dari lokasi aksi.

Perwakilan koalisi, Usman Hamid, menilai pelibatan tentara dalam pengamanan demonstrasi bertentangan dengan pemisahan fungsi TNI dan Polri.

Menurut dia, pengerahan militer untuk menghadapi warga yang menyampaikan aspirasi di ruang publik berpotensi mengancam kebebasan sipil. "Pengamanan aksi demonstrasi harus dilaksanakan dengan menghormati kebebasan sipil dan tidak memperlakukan warga yang menyampaikan kritik maupun aspirasi sebagai ancaman militer," kata Usman dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (28/10/2026).

Koalisi menyoroti keberadaan prajurit TNI di sejumlah titik demonstrasi, mulai dari kawasan



TNI tampak mengamankan demonstrasi di sejumlah titik Jakarta pada Rabu (28/10/2026). ist

Bundaran Hotel Indonesia (HI) hingga gang-gang permukiman. Mereka menilai penempatan tentara di lokasi tersebut berpotensi menimbulkan intimidasi terhadap masyarakat yang hendak menyampaikan pendapat. Desakan itu disampaikan koalisi yang terdiri dari 25 organisasi masyarakat sipil, termasuk YLBHI, Imparsial, KontraS, Amnesty International Indonesia, Indonesia Corruption Watch (ICW), dan ELSAM.

Usman mengatakan pelibatan TNI dalam pengamanan demonstrasi

bertentangan dengan fungsi utama militer sebagai alat pertahanan negara. Ia merujuk Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025. "Tugas TNI adalah menyelenggarakan pertahanan negara, bukan mengamankan demonstrasi atau menghadapi massa yang menyampaikan aspirasi di depan umum," ujar Usman.

Koalisi juga merujuk Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998

tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Kedua landasan tersebut, menurut mereka, menegaskan perbedaan fungsi TNI di bidang pertahanan dan Polri dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat.

Koalisi menilai pengerahan tentara untuk mengamankan demonstrasi berisiko mengaburkan batas antara pertahanan negara dan keamanan dalam negeri. Mereka juga mengingatkan bahwa pemisahan peran TNI dan Polri merupakan salah satu capaian penting Reformasi 1998 untuk mengakhiri praktik dwifungsi ABRI dan memperkuat supremasi sipil.

Menurut Usman, keterlibatan militer dalam menghadapi demonstran dapat menghidupkan kembali pendekatan militeristik yang pernah mewarnai pemerintahan Orde Baru. Koalisi menilai negara harus menjamin keamanan demonstran sekaligus melindungi kebebasan menyampaikan pendapat. Karena itu, pengerahan tentara dalam pengamanan aksi dinilai perlu dihentikan agar tidak mengancam ruang sipil. (tin,fua,ist/dya)

DPRD Kota Malang Soroti Penurunan Target Pengangguran hingga Pengelolaan Sampah di 2027

MALANG - DPRD Kota Malang menyoroti pencapaian target penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) hingga persiapan anggaran program pengelolaan sampah dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027.

Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, meminta alokasi anggaran yang disusun Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mampu menjawab tantangan pembangunan serta mendukung pencapaian indikator yang sebelumnya telah ditetapkan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027.

"Yang perlu kami perhatikan adalah bagaimana bisa mendeliver apa yang sudah ditetapkan di KUA-PPAS 2027 sebelumnya," ujarnya, dikutip pada Rabu (28/10/2026).

Amithya menyebut, TPT menjadi salah satu indikator yang menjadi perhatian. Ia menilai, upaya menekan pengangguran perlu didukung pendataan ketenagakerjaan yang lebih

menyeluruh, termasuk mengenai jumlah perusahaan, serapan tenaga kerja lokal, serta potensi pekerjaan yang belum teridentifikasi.

Hal tersebut, menurutnya, penting untuk mengetahui seberapa besar masyarakat Kota Malang yang belum terserap dalam lapangan pekerjaan yang tersedia.

Ia mencontohkan, perkembangan pekerjaan informal, termasuk profesi konten kreator, menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pemetaan ketenagakerjaan. Karena itu, politisi PDI Perjuangan ini berharap dinas terkait dapat melakukan pendataan secara komprehensif agar kondisi ketenagakerjaan di Kota Malang dapat tergambarkan dengan lebih jelas.

"Harapan saya nanti dari situ bisa menjawab berapa persen masyarakat Kota Malang sendiri yang masih belum tertampung atau belum berhasil mendapatkan lapangan pekerjaan yang ada di Kota Malang," katanya.

Di sisi lain, Amithya mengatakan pembahasan RAPBD 2027 juga perlu memperhitungkan kebutuhan

pembiayaan sejumlah program dari pemerintah pusat. Salah satunya program pengelolaan sampah melalui Local Service Delivery Project (LSDP) yang menggunakan mekanisme penggantian biaya atau reimburse secara bertahap.

Ia menyebut, Pemkot Malang perlu menyiapkan anggaran sekitar Rp36 miliar untuk program tersebut pada RAPBD 2027. "Di RAPBD 2027 ini kalau tidak salah kami harus menyiapkan sekitar Rp36 miliar," katanya.

Sementara itu, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, telah menyampaikan nota keuangan dan RAPBD tahun anggaran 2027 kepada DPRD Kota



Malang pada Selasa (27/10). Ia menjelaskan, dokumen yang disampaikan masih mengacu pada pembahasan KUA-PPAS dan akan menjadi bahan untuk pembahasan lebih lanjut. (Santi/Dya)

Beasiswa 1.000 Sarjana: Tahun Depan Pemkot Batu Siapkan Rp15 M



Wali Kota Batu, Nurochman. (foto: Prokopim Kab. Malang)

BATU - Pemerintah Kota (Pemkot) Batu mengalokasikan anggaran Rp15 miliar untuk program Beasiswa Seribu Sarjana dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Dana tersebut disiapkan untuk menjaga keberlanjutan program bantuan pendidikan tinggi bagi warga Kota Batu, khususnya mahasiswa dari keluarga kurang mampu dan anak-anak berprestasi.

Wali Kota Batu, Nurochman, mengatakan penyusunan RAPBD 2027 diarahkan pada program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas melalui dukungan anggaran untuk Beasiswa Seribu Sarjana.

"APBD 2027 harus berorientasi pada hasil dan manfaat nyata bagi masyarakat. Salah satunya melalui sektor pendidikan. Kita alokasikan Rp15 miliar untuk Beasiswa 1.000 Sarjana agar anak-anak Kota Batu bisa menempuh bangku kuliah tanpa terkendala biaya," ujar Nurochman, Rabu (28/10/2026).

Menurut pria yang akrab dengan sapaan Cak Nur tersebut, program Beasiswa 1.000 Sarjana ditujukan untuk memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat Kota Batu. Melalui program ini, anak-anak berprestasi dan warga dari keluarga kurang mampu diharapkan memiliki

kesempatan yang lebih merata untuk melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi.

Ia menilai investasi di sektor pendidikan merupakan langkah jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sekaligus memutus rantai kemiskinan. Akses pendidikan tinggi juga diharapkan dapat mendorong generasi muda Kota Batu memiliki daya saing yang lebih kuat di tengah persaingan global.

"Investasi pada pendidikan merupakan langkah jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan dan mencetak generasi muda daerah yang berdaya saing tinggi," tambahnya.

Selain pendidikan, Pemkot Batu turut menyiapkan anggaran untuk mendukung pelayanan dasar di bidang kesehatan. Dalam RAPBD 2027, alokasi untuk jaminan kesehatan melalui skema Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) mencapai Rp37,9 miliar.

Dukungan anggaran pendidikan dan kesehatan tersebut menjadi bagian dari perencanaan belanja

daerah yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Namun, menurutnya, realisasi berbagai program tersebut tetap bergantung pada pembahasan dan penetapan APBD 2027.

Untuk menopang kebutuhan belanja daerah, Pemkot Batu menargetkan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp365 miliar pada 2027. Target tersebut akan diupayakan melalui intensifikasi pendapatan, digitalisasi sistem perpajakan, serta optimalisasi potensi daerah.

Nurochman menegaskan, upaya meningkatkan PAD tidak akan dilakukan dengan menaikkan tarif pajak yang dapat menambah beban masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Target PAD Rp365 miliar akan kita capai melalui intensifikasi dan digitalisasi sistem perpajakan. Kita pastikan tidak ada kenaikan tarif yang membebani masyarakat kecil maupun pelaku UMKM," tegas Cak Nur. (Santi/Dya)

ZELENSKY DIUNDANG KE MOSKOW, TRUMP SEBUT PERTEMUAN SEGERA DIGELAR

Upaya mengakhiri perang Rusia-Ukraina kembali mendapat sinyal baru. Presiden Rusia Vladimir Putin mengundang Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk berunding langsung di Moskow dan menjanjikan jaminan keselamatan. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan pertemuan kedua pemimpin tersebut akan diupayakan berlangsung sesegera mungkin.

Undangan Putin disampaikan melalui pembantu kepresidenan Rusia, Yuri Ushakov, sebagaimana dilaporkan kantor berita pemerintah Rusia, TASS, dan dikutip Anadolu Agency pada Rabu (28/10/2026). Menurut Ushakov, Putin kembali menegaskan kesediaannya menggelar negosiasi langsung apabila Zelensky memang ingin bertemu.

"Pimpinan militer kami menekankan perlunya menyadarkan kelompok jahat tersebut bahwa unit-unit pasukan tembak kami telah menempati posisi tembak mereka," kata Kim Yo Jong.

"Atasan kami menegaskan kembali bahwa jika Zelenskyy benar-benar ingin mengadakan negosiasi langsung, dia harus datang ke Moskow. Di sana, semua kondisi yang diperlukan, termasuk yang berkaitan dengan keselamatannya, akan disediakan untuknya," demikian laporan TASS yang mengutip pernyataan Ushakov.

Ushakov juga menyebut Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Støre dan Presiden Finlandia Alexander Stubb telah menyampaikan kepada Putin dalam percakapan telepon baru-baru ini bahwa Zelensky tertarik mengadakan pembicaraan langsung dengan pemimpin Rusia tersebut. Namun, pernyataan itu belum dengan sendirinya menunjukkan bahwa kedua presiden telah menyepakati tempat dan waktu pertemuan.

Di sisi lain, Trump pada Rabu menyampaikan optimisme mengenai kemungkinan pertemuan Putin dan Zelensky. Berbicara kepada wartawan di Amerika Serikat, ia mengatakan pertemuan tersebut akan direncanakan dalam waktu dekat, di tengah peningkatan upaya diplomatik Washington untuk menghentikan perang.

"Akan ada pertemuan yang direncanakan sesegera mungkin dan banyak kemajuan yang akan dibuat," kata Trump, seperti dikutip AFP.

Pernyataan Trump muncul setelah Zelensky pada pekan sebelumnya menyebut peluang pembicaraan yang diprakarsai Amerika Serikat dapat terwujud pada November 2026. Menurut Zelensky, tujuan pertemuan itu adalah menghidupkan kembali proses perundingan damai yang berulang kali menemui jalan buntu.

Kremlin juga menyampaikan rencana pertemuan tiga negara di Uni Emirat Arab (UEA) pada November



Ukraina kembali diserang oleh Rusia, tepatnya di wilayah infrastruktur sipil di Kharkiv dan Oblast Kharkiv selama 24 jam terakhir pada Rabu (28/10/2026). (Ist.Layanan Darurat Negara Ukraina))

2026. Rencana tersebut mengindikasikan bahwa jalur diplomasi yang melibatkan Rusia, Ukraina, dan Amerika Serikat masih diupayakan. Meski demikian, pertemuan trilateral yang direncanakan itu berbeda dari pertemuan bilateral Putin-Zelensky di

Moskow yang ditawarkan pihak Rusia.

Upaya diplomasi tersebut berlangsung di tengah perbedaan posisi mendasar kedua negara. Putin sebelumnya menegaskan keinginan Rusia untuk menguasai seluruh wilayah di bagian timur Ukraina.

Sementara itu, perundingan damai yang melibatkan kedua pihak belum menghasilkan penyelesaian yang dapat mengakhiri perang.

Sikap Rusia yang sebelumnya disebut belum bersedia menggelar pertemuan langsung dengan Zelensky menjadi salah satu latar penting bagi perkembangan terbaru ini. Namun, undangan ke Moskow belum menjamin bahwa pertemuan akan terlaksana. Belum ada kepastian mengenai kesediaan Zelensky menerima undangan tersebut maupun kesepakatan mengenai agenda dan format negosiasi.

Trump sendiri kembali mendorong penyelesaian konflik setelah berjanji mengakhiri perang Rusia-Ukraina dalam waktu 24 jam ketika kembali menjabat pada Januari 2025. Hingga Oktober 2026, upaya Amerika Serikat belum menghasilkan kesepakatan damai yang mengakhiri konflik yang telah berlangsung sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. (tin,ana,ist/dya)

Presiden Iran Kunjungi Putin: Masalah Bisa Diselesaikan Tanpa AS

PRESIDEN Iran Masoud Pezeshkian menegaskan bahwa negara-negara di Timur Tengah mampu menyelesaikan persoalan kawasan tanpa bergantung pada Amerika Serikat (AS). Pernyataan itu disampaikan saat bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow, Selasa (27/10/2026), di tengah kebuntuan negosiasi untuk mengakhiri perang Iran melawan AS dan Israel.

Pertemuan kedua pemimpin berlangsung di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Forum Negara-negara Eksportir Gas atau Gas Exporting Countries Forum (GECF). Dalam pertemuan tersebut, Pezeshkian juga menyuarakan perkembangan perdagangan Iran-Rusia dan pentingnya memperkuat kerja sama dengan negara-negara yang menghadapi sanksi sepihak AS.

"Saya meyakini kita mampu menyelesaikan masalah-masalah kita di kawasan ini, tanpa bergantung pada Amerika Serikat," kata Pezeshkian, seperti dilaporkan AFP pada Rabu

(28/10/2026).

Ia menilai kebijakan AS di kawasan justru mendorong negara-negara yang terkena sanksi untuk memperluas kerja sama. "Perdagangan kita terus berkembang dan tumbuh dari hari ke hari. Tindakan AS di kawasan ini justru mempermudah kita untuk melangkah menuju ke multilateralisme yang lebih luas, dan memperkuat kerja sama dengan Anda dan negara-negara lainnya yang juga terkena sanksi sepihak dari AS," ujarnya.

Pezeshkian menyatakan Iran dan Rusia memiliki peluang untuk memperluas hubungan di berbagai sektor. Kerja sama yang ingin dikembangkan mencakup ilmu pengetahuan, industri, kebudayaan, keamanan, hingga militer. Pernyataan itu memperlihatkan bahwa agenda pertemuan kedua negara tidak hanya berkaitan dengan situasi perang, tetapi juga kepentingan bilateral jangka panjang.

Putin mengatakan dirinya telah berbicara empat mata dengan

Pezeshkian mengenai situasi di Timur Tengah. Presiden Rusia itu mengakui perkembangan kawasan menjadi sumber kekhawatiran dan berharap keadaan bergerak ke arah yang lebih baik.

"Tadi kita sempat berbincang empat mata mengenai situasi di kawasan ini, situasi yang tidak diragukan lagi dapat menimbulkan kekhawatiran," kata Putin. Ia berharap situasi tersebut akan "berkembang ke arah yang positif".

Pertemuan ini berlangsung ketika upaya diplomatik untuk mengakhiri perang Iran dengan AS dan Israel masih menghadapi hambatan. Konflik tersebut pecah pada 28 Februari 2026 setelah serangan gabungan AS-Israel terhadap Iran. Negosiasi antara Teheran dan Washington dilaporkan terhenti selama berbulan-bulan, sementara kedua pihak masih menghadapi ancaman berlanjutnya serangan.

Rusia berupaya memainkan peran sebagai penengah dalam konflik tersebut. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengunjungi Iran pada pekan sebelumnya untuk pertama kali sejak perang pecah. Lavrov menyatakan upaya Moskow diarahkan untuk mencegah konflik kembali berkembang menjadi perang berskala besar. (tin,afp,ist/dya)



Me Time dengan Olahraga Bantu Redakan Stres

Yoga hingga bersepeda santai bisa menjadi pilihan untuk meluangkan waktu bagi diri sendiri. Selain menjaga kebugaran, aktivitas fisik dapat membantu memperbaiki suasana hati dan meredakan stres.

Rutinitas pekerjaan, tuntutan keluarga, hingga aktivitas sehari-hari yang padat bisa menguras energi fisik dan mental. Di tengah kesibukan tersebut, meluangkan waktu untuk diri sendiri atau me time menjadi salah satu cara untuk mengambil jeda dan memulihkan energi.

Me time tidak selalu harus diisi dengan liburan atau aktivitas yang membutuhkan biaya besar. Berolahraga juga bisa menjadi pilihan sederhana untuk sejenak menjauh dari rutinitas, menggerakkan tubuh, dan mengalihkan perhatian dari berbagai hal yang memenuhi pikiran.

Aktivitas fisik tidak harus selalu berupa latihan intens di pusat kebugaran. Yoga, berjalan kaki, berenang, bersepeda santai, hingga Pilates dapat menjadi alternatif yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan tubuh.

Berikut lima olahraga yang bisa dicoba untuk mengisi waktu me time.

Yoga

Yoga memadukan gerakan tubuh, latihan pernapasan, dan konsentrasi. Kombinasi tersebut dapat membantu seseorang lebih memperhatikan kondisi tubuh sekaligus memberi kesempatan untuk berhenti sejenak dari kesibukan sehari-hari.

Latihan ini juga bermanfaat untuk melatih fleksibilitas, keseimbangan, dan kekuatan tubuh. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa yoga berpotensi membantu mengurangi stres dan kecemasan, meskipun hasilnya dapat berbeda pada setiap orang. Tidak perlu langsung mencoba gerakan yang rumit. Pemula bisa memulai dengan sesi selama 10–15 menit di rumah. Pilih tempat yang nyaman, atur napas secara perlahan, dan lakukan gerakan sesuai kemampuan.

Jalan Kaki

Jalan kaki merupakan salah satu bentuk aktivitas fisik yang mudah dilakukan tanpa memerlukan

peralatan khusus. Aktivitas ini bisa dilakukan di taman, sekitar rumah, atau jalur pejalan kaki yang aman.

Luangkan waktu sekitar 15–30 menit untuk berjalan dengan kecepatan yang nyaman. Agar menjadi momen me time, cobalah mengurangi kebiasaan memeriksa ponsel dan memberi perhatian pada lingkungan sekitar. Berjalan kaki di luar ruangan juga memberi kesempatan untuk menikmati suasana dan mendapatkan paparan cahaya alami. Aktivitas fisik secara umum berkaitan dengan suasana hati yang lebih baik dan dapat membantu mengurangi ketegangan.

Jika jadwal sedang padat, jalan kaki bisa disisipkan saat istirahat makan siang atau setelah pekerjaan selesai. Durasi dan intensitasnya dapat disesuaikan dengan kondisi tubuh.

Berenang

Berenang bisa menjadi pilihan bagi mereka yang ingin berolahraga sambil menikmati sensasi berada di air. Gerakan yang berulang dan ritme pernapasan selama berenang dapat membuat sebagian orang merasa lebih rileks.

Di sisi kebugaran, berenang melibatkan berbagai kelompok otot dan membantu melatih daya tahan tubuh. Aktivitas ini juga relatif minim benturan dibandingkan sejumlah olahraga yang dilakukan di darat. Agar sesi berenang terasa seperti me time, pilih waktu yang tidak terlalu ramai dan gunakan kecepatan yang nyaman. Tidak perlu memaksakan diri

mengejar jumlah putaran atau durasi tertentu.

Bersepeda Santai

Bersepeda santai cocok bagi mereka yang ingin tetap aktif sambil menikmati suasana luar ruangan. Mengayuh sepeda di taman atau jalur khusus sepeda memungkinkan tubuh bergerak sekaligus memberi kesempatan untuk menyegarkan pikiran.

Aktivitas ini dapat membantu meningkatkan kebugaran jantung dan paru-paru serta melatih kekuatan otot kaki. Bersepeda di luar ruangan juga menawarkan variasi suasana yang mungkin tidak didapatkan ketika terus berada di rumah atau tempat kerja.

Pilates

Pilates merupakan latihan yang menekankan kontrol gerakan, postur tubuh, keseimbangan, dan kekuatan otot inti. Latihan ini juga melibatkan koordinasi antara gerakan dan pernapasan.

Saat melakukan Pilates, perhatian diarahkan pada posisi tubuh dan ketepatan gerakan. Fokus tersebut dapat menjadi kesempatan untuk lebih menyadari kondisi tubuh dan mengambil jeda dari berbagai distraksi sehari-hari. Pemula dapat memulai dengan gerakan dasar melalui kelas atau panduan latihan yang sesuai. Lakukan gerakan secara perlahan dan hindari memaksakan posisi yang belum dikuasai. (farist/dya)

Menguak Rahasia Umur Panjang Kura-Kura Tertua di Dunia



Kura-kura raksasa bernama Jonathan telah hidup selama hampir dua abad. Usianya yang luar biasa panjang menarik perhatian ilmuwan untuk mengungkap mekanisme biologis yang membuat proses penuaannya berlangsung lebih lambat.

Jonathan tiba di Pulau Saint Helena pada 1882. Saat itu, kura-kura Aldabra tersebut diperkirakan telah berusia

sekitar 50 tahun. Berdasarkan perkiraan itu, usianya kini mendekati 194 tahun, meski tanggal kelahirannya tidak diketahui secara pasti.

Dokter yang merawatnya, Joe Hollins, meyakini Jonathan mungkin lebih tua daripada perkiraan resmi. Di tengah ketidakpastian tersebut, Jonathan memiliki catatan kehidupan yang membuatnya menjadi subjek penting untuk penelitian umur

panjang. Penelitian yang dipimpin Benjamin Vaisvil bersama koleganya dari Yayasan Kallel diterbitkan dalam jurnal Science Advances pada awal Oktober 2026. Studi berjudul Epigenetic insights into extreme longevity in the world's oldest terrestrial animal, Jonathan itu menelusuri hubungan antara genetika dan proses penuaan.

Membaca Rahasia DNA

Peneliti tidak dapat mengambil sampel darah Jonathan karena otoritas Saint Helena melarang prosedur tersebut demi menjaga kesehatannya. Sebagai gantinya, tim mengumpulkan sel dan air liur dengan mengusap bagian dalam pipinya.

Proses pengambilan sampel tidak mudah. Dokter Joe Hollins harus menggunakan sarung tangan las tebal, menahan kepala Jonathan, dan mengambil sampel dalam waktu sekitar lima detik sebelum kura-kura itu menggerakkan kakinya. Sampel kemudian dikirim melalui jalur laut karena terbatasnya jadwal penerbangan dari pulau tersebut.

Tim menganalisis genom dan epigenom Jonathan. Genom dapat diibaratkan sebagai buku resep yang memuat instruksi genetis, sedangkan epigenom merupakan catatan yang mengatur kapan dan bagaimana instruksi itu digunakan.

Dari analisis genom, ditemukan 287 variasi genetis unik yang tidak ditemukan pada kura-kura raksasa lain yang menjadi pembanding. Sebanyak 22 variasi mengalami seleksi positif, yang berarti variasi tersebut diduga memberikan

keuntungan bagi kelangsungan hidup selama proses evolusi. Variasi itu berkaitan dengan perbaikan DNA, pengaturan insulin, fungsi mitokondria, serta pemeliharaan telomer. Telomer merupakan bagian pelindung di ujung kromosom yang berperan dalam proses penuaan sel.

Bagian Sel yang Tetap Muda

Temuan penting lainnya berasal dari analisis epigenom. Seiring bertambahnya usia, pola metilasi DNA umumnya menjadi semakin tidak teratur. Fenomena ini dikenal sebagai entropi metilasi dan dapat mencerminkan perubahan dalam pengaturan aktivitas gen.

Namun, penelitian menemukan pola berbeda pada bagian genom Jonathan yang mengatur fungsi mitokondria dan metabolisme RNA. Di wilayah tersebut, tingkat entropi metilasinya relatif rendah, setara dengan kura-kura berusia lima tahun bernama Hatchling yang digunakan sebagai pembanding.

Mitokondria berfungsi menghasilkan energi bagi sel. Ketika organel ini mengalami gangguan, kemampuan sel untuk bekerja dan memperbaiki kerusakan ikut terpengaruh. Disfungsi mitokondria juga dikenal sebagai salah satu ciri utama penuaan.

Justin Gerlach, ahli biologi dari Universitas Cambridge yang terlibat dalam penelitian, menilai Jonathan masih memiliki kendali genetis seperti hewan yang jauh lebih muda. "Jonathan masih memiliki kendali genetis layaknya hewan yang jauh lebih muda," ujarnya dalam wawancara dengan NPR (far,ist/dya).



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, ARIEF SUKAPUTRA, MUHIBUDIN KAMALI

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO I SIDOARJO: TEGUH A I GRESIK: ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) I MOJOKERTO: NUR HIDAYAH I LAMONGAN: L HANDI I BLITAR: ARIEF SUKAPUTRA I KEDIRI: AIS I JOMBANG : SUTONO I PASURUAN-PROBOLINGGO- PONOROGO : IMAN SANTOSO I BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI: PURCAHYONO JULIATMOKO I MADIUN: WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) I MALANG RAYA: SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. I TRENGGALEK: HERLAMBAH I MADURA RAYA: SAHLAN KURNIAWAN I NGAWI: DIMAS RIDHO SURYO BASKORO I DKI JAKARTA: FUAD HASSAN I LOMBOK BARAT: MUHAYYAN I PALANGKA RAYA: NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH I MARKETING COMMUNICATION JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN I SEKERTARIS FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILA DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN, FADHILA I ALAMAT REDAKSI JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26, JL TENGGILIS TENGAH 4 I TELP 03187854491 I PENERBIT PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA I ALAMAT PERCETAKAN SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA I TELP IKLAN 031-87854491 I NIB 91205006801134 I HARGA IKLAN RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal kewartawanan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal kewartawanan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

Berry Girl Makeup, Tren Riasan Bernuansa Buah Beri yang Manis

Tren kecantikan terus menghadirkan beragam gaya riasan yang memadukan kesan natural dengan warna-warna berani. Salah satunya Berry Girl Makeup, tampilan yang terinspirasi dari warna buah beri, mulai dari merah stroberi hingga ungu gelap mulberry.

Gaya ini menonjolkan pipi merona, bibir berwarna merah keunguan, serta riasan mata bernuansa mauve dan plum. Perpaduan tersebut menghasilkan tampilan yang segar, romantis, sekaligus dewasa tanpa harus menggunakan makeup tebal.

Berry Girl Makeup menjadi pilihan bagi pencinta kecantikan yang ingin mengeksplorasi warna, tetapi tetap mempertahankan kesan ringan untuk aktivitas sehari-hari. Riasan ini juga dapat disesuaikan untuk berbagai kesempatan, dari kegiatan siang hari hingga makan malam.

Ciri Khas Berry Girl Makeup

Salah satu elemen utama gaya riasan ini adalah kulit yang tampak sehat dan bercahaya. Complexion dengan hasil akhir dewy dapat diperoleh menggunakan tinted moisturizer atau foundation bertekstur ringan. Highlighter diaplikasikan secukupnya pada tulang pipi dan batang hidung untuk memberikan efek berkilau alami.

Warna pipi menjadi unsur penting berikutnya. Blush bernuansa cranberry, merah beri, atau merah anggur dapat memberikan kesan merona. Teknik blush draping, yakni membaurkan blush dari pipi menuju pelipis, bisa digunakan untuk menciptakan dimensi sekaligus mempertegas bentuk wajah. Pada bagian mata, pilihan warna mauve, plum, dan burgundy memberikan

karakter tanpa membuat tampilan terlalu berat. Eyeshadow dengan sedikit shimmer dapat menambah kesan lembut, sedangkan maskara membantu mempertegas mata. Bagi yang menginginkan hasil lebih tegas, eyeliner dengan bentuk sayap tipis bisa menjadi pilihan.

Bibir menjadi salah satu titik perhatian dalam Berry Girl Makeup. Warna raspberry red, mulberry, dan deep rose memberikan sentuhan khas buah beri. Lip tint cocok untuk hasil yang ringan, sementara lipstick dengan warna lebih pekat dapat menciptakan tampilan bold. Lip gloss juga bisa ditambahkan untuk menghasilkan efek bibir berkilau dan tampak segar.

Teknik ombre lips dapat menjadi alternatif bagi mereka yang menyukai gradasi warna. Warna lebih gelap ditempatkan pada bagian dalam bibir, kemudian dibaurkan ke arah luar untuk menghasilkan tampilan yang lembut.

Bisa untuk Berbagai Warna Kulit

Warna beri memiliki rentang yang cukup luas sehingga dapat disesuaikan dengan beragam warna kulit. Namun, pemilihan warna sebaiknya tidak hanya berpatokan pada tren, melainkan juga pada intensitas warna dan hasil akhir yang diinginkan.

Warna raspberry atau merah beri yang cerah dapat memberikan kontras pada riasan, sedangkan plum dan mulberry menawarkan kesan lebih dalam. Nuansa mauve dan rose bisa

dipilih untuk tampilan yang lebih lembut. Agar hasilnya tetap seimbang, intensitas warna pada pipi, mata, dan bibir dapat diatur sesuai kebutuhan. Jika bibir menggunakan warna berry yang kuat, misalnya, riasan mata bisa dibuat lebih sederhana. Sebaliknya, eyeshadow bernuansa plum dapat menjadi aksen ketika bibir menggunakan warna yang lebih ringan.

Cara Membuat Riasan Tetap Segar

Untuk penggunaan sehari-hari, Berry Girl Makeup tidak harus diterapkan dengan warna yang pekat. Gunakan complexion tipis, blush yang dibaurkan merata, serta lip tint bernuansa beri untuk mendapatkan kesan segar.

Sementara itu, tampilan untuk acara malam dapat dibuat lebih intens melalui tambahan eyeshadow burgundy, eyeliner, atau lipstick berry dengan warna lebih dalam.

Penggunaan produk berkilau juga perlu disesuaikan. Highlighter dan lip gloss dapat memperkuat kesan segar, tetapi tidak harus diaplikasikan secara berlebihan pada seluruh bagian wajah. Pada akhirnya, daya tarik Berry Girl Makeup terletak pada permainan warna yang fleksibel. Perpaduan merah, merah muda, dan ungu khas buah beri memungkinkan pemakainya menciptakan tampilan yang manis sekaligus berkarakter, tanpa terpaku pada satu gaya riasan tertentu. (far,ist/dya)

BERRY GIRL MAKEUP

1. Complexion:

Foundation ringan dengan hasil akhir dewy untuk kulit bercahaya.

2. Blush:

Cranberry atau merah beri, baurkan dari pipi ke pelipis.

3. Riasan mata:

Eyeshadow mauve, plum, atau burgundy dengan sentuhan shimmer.

4. Bibir:

Raspberry red, mulberry, atau deep rose sebagai fokus utama.

5. Efek juicy:

Tambahkan lip gloss untuk bibir berkilau.

6. Tampilan siang:

Blush tipis, complexion ringan, dan lip tint berry.



Endus Aroma Permainan Cukai....dari Hal 1

Komisi Pemberantasan Korupsi (PKP) mengeledah kantor PT Djarum dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Kudus, Jawa Tengah, Rabu (28/10/2026). Pengeledahan ini dilakukan setelah KPK menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru dalam pengembangan perkara di lingkungan. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Penyidik mendalami dugaan penyimpangan penerimaan negara dari cukai rokok, termasuk kemungkinan pemberian uang kepada oknum Bea Cukai dalam pengurusan pita cukai.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan dugaan awal perkara berkaitan dengan penerimaan negara dari cukai di PT Djarum. Penyidik belum mengungkap konstruksi perkara secara terperinci karena penyidikan masih berada pada tahap awal.

"Yang pasti dugaan awal dari penyidikan perkara ini berkaitan dengan penerimaan negara berkaitan dengan cukai di PT Djarum," kata Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (28/10/2026).

KPK juga mendalami kemungkinan adanya kickback atau pemberian uang dari pihak perusahaan kepada oknum di lingkungan Bea dan Cukai. Dugaan itu berkaitan dengan pengurusan pita cukai yang ditempelkan pada setiap bungkus rokok. Namun, penyidik masih membuka kemungkinan adanya modus lain yang berkaitan dengan perkara tersebut.

"Semuanya masih didalami. Yang pertama karena ini memang masih di tahap awal," ujar Budi. Ia melanjutkan, "Yang kedua, apakah ini kemudian nanti ada kickback ataupun dugaan pemberian yang dilakukan oleh PT Djarum kepada oknum-oknum di Bea dan Cukai berkaitan dengan pita cukai ya, yang digunakan untuk ditempel di setiap bungkus rokok atau kemudian ada modus-modus lainnya."

Dalam pengeledahan di dua lokasi tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Barang-barang itu akan menjadi bahan untuk menelusuri dugaan tindak pidana dan menguji keterkaitan pihak-pihak yang diperiksa dengan perkara yang sedang disidik.

"Beberapa yang diamankan di antaranya dokumen dan juga barang bukti elektronik," kata Budi.

Hingga Rabu malam, KPK belum mengumumkan secara terperinci isi dokumen maupun data elektronik yang disita.

Pengeledahan di kantor Bea Cukai Kudus berlangsung sejak Rabu pagi.

Walaupun demikian, Budi mengatakan KPK akan mengumumkan

lebih lanjut bila ada barang bukti lain yang ditemukan dalam pengeledahan dua lokasi tersebut.

Berdasarkan laporan dari lokasi, rombongan petugas KPK tiba sekitar pukul 10.00 WIB menggunakan lima mobil. Puluhan petugas kemudian terlihat memasuki sejumlah ruangan, termasuk ruang kerja Kepala KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus. Sebagian petugas juga bergerak menuju gedung pelayanan yang berada di sebelahnya.

Di tengah pengeledahan, aktivitas pelayanan di kantor tersebut masih berlangsung. Sejumlah pegawai tetap bekerja, sementara warga dan pelaku usaha terlihat mengurus pengambilan pita cukai rokok. Polisi setempat turut mengerahkan lima personel untuk membantu pengamanan di kantor Bea Cukai Kudus, sebagaimana diberitakan detikjateng.

Budi menjelaskan, pengeledahan tersebut merupakan bagian dari pengembangan penyidikan perkara Bea dan Cukai dengan sprindik baru yang diterbitkan pada Oktober 2026. Ia menegaskan, penyidikan ini berada di luar dua pengembangan perkara yang diumumkan KPK pada 21 Juli 2026.

"Benar, di luar itu," kata Budi ketika ditanya mengenai hubungan penyidikan baru tersebut dengan pengembangan perkara sebelumnya. Dengan penerbitan sprindik baru itu, KPK belum menetapkan tersangka dalam perkara yang menjadi dasar pengeledahan kantor Djarum dan Bea Cukai Kudus.

Setelah pengeledahan berlangsung, pihak Grup Djarum menyampaikan respons melalui Corporate Communication Manager Budi Darmawan. Perusahaan menyatakan tidak mengetahui secara terperinci duduk perkara yang sedang diselidiki dan akan menghormati proses hukum serta bersikap kooperatif.

"Kami menghormati dan menaati hukum. Kooperatif," kata Budi Darmawan saat dihubungi, Rabu (28/10).

Berawal dari Suap Importasi

Penyidikan baru ini muncul di tengah proses hukum kasus dugaan korupsi di lingkungan Bea dan Cukai yang bermula dari operasi tangkap tangan KPK pada Februari 2026. Dalam perkara sebelumnya, penyidik mengusut dugaan pengaturan pemeriksaan barang impor agar memperoleh jalur yang lebih longgar, termasuk barang yang semestinya menjalani pemeriksaan ketat melalui jalur merah.

Perkara tersebut menyeret pejabat Bea Cukai dan pihak swasta dari Blue-ray Cargo. Dalam perkembangan penyidikan yang diumumkan pada Juli 2026, KPK menerbitkan dua sprindik baru. Hingga 26 Agustus 2026, delapan orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam rangkaian perkara tersebut, yakni Rizal, Sispryan

Subiaksono, Orlando Hamonangan, John Field, Dedy Kurniawan, Andri, Budiman Bayu Prasajo, dan Gatot Heroe Hernanda.

Rizal merupakan Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat; Sispryan Subiaksono menjabat Kepala Subdirektorat Intelijen Bea Cukai; sedangkan Orlando Hamonangan merupakan Kepala Seksi Penindakan II Bea Cukai.

Dari pihak swasta, KPK menetapkan pemilik Blue-ray Cargo John Field, Manajer Operasional Dedy Kurniawan, serta Ketua Tim Dokumentasi Importasi Andri. Dua pejabat lainnya adalah Budiman Bayu Prasajo, Kepala Seksi Intelijen Cukai Bea Cukai, dan Gatot Heroe Hernanda, Kepala Kantor Bea Cukai Kediri.

Meski berkaitan dengan pengembangan perkara Bea dan Cukai, penyidikan yang mendasari pengeledahan Djarum kali ini memiliki sprindik tersendiri. Karena itu, dugaan permainan cukai rokok dan kemungkinan pemberian kepada oknum Bea Cukai masih harus dibuktikan melalui proses penyidikan. Pengeledahan tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatan atau kesalahan perusahaan maupun individu tertentu.

Penerimaan Cukai Rokok Tertekan

Penerimaan cukai masih menghadapi tantangan di tengah pergeseran konsumsi ke rokok berharga murah dan peredaran rokok ilegal. Hingga Juli 2026, penerimaan cukai baru mencapai Rp130,7 triliun atau 53,6 persen dari target tahunan. Sementara itu, pemerintah memproyeksikan penerimaan cukai pada 2027 hanya tumbuh 0,4 persen dibandingkan outlook 2026.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Djaka Budhi Utama menyampaikan, penerimaan cukai hingga 31 Juli 2026 tumbuh 3 persen secara tahunan (year-on-year/YoY), dari Rp126,9 triliun pada periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan tersebut didorong penegakan hukum yang membantu menjaga produksi rokok dan minuman mengandung etil alkohol (MMEA). Meski demikian, realisasinya masih di bawah target APBN 2026 sebesar Rp243,5 triliun.

Secara keseluruhan, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp182,6 triliun hingga Juli 2026, tumbuh 6,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp171,1 triliun. Namun, realisasi tersebut baru mencapai 54,3 persen dari target Rp336 triliun. Pemerintah memperkirakan penerimaan hingga akhir tahun hanya mencapai Rp320,6 triliun atau berpotensi mengalami kekurangan penerimaan (shortfall) Rp15,4 triliun.

Dibandingkan cukai, penerimaan bea masuk dan bea keluar mencatat pertumbuhan lebih tinggi. Bea masuk mencapai Rp31,5 triliun, naik 12,2

ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI (DBHCHT 2026)

Pagu Anggaran Nasional:
Rp3,28 Triliun
(PMK 12/2026 & PMK 22/2026)

Distribusi Pemanfaatan Anggaran:

50% Kesejahteraan

BLT Buruh Tani & Buruh Pabrik Rokok

40% Kesehatan

Fasilitas Kesehatan & Jaminan Kesehatan

10% Hukum

Operasi & Sosialisasi Gempur

Ringkasan Korporasi PT Djarum

- **Pendiri & Pusat:** Didirikan oleh Oei Wie Gwan pada tahun 1951 di Kudus, Jawa Tengah.
- **Pemilik Saat Ini:** Dikelola oleh Keluarga Hartono (Budi & Michael Hartono), salah satu keluarga terkaya di Indonesia.
- **Skala Tenaga Kerja:** Mempekerjakan lebih dari 80.000 karyawan, didominasi oleh buruh luring Sigaret Kretek Tangan (SKT).
- **Fokus Pasar:** Menguasai pasar domestik dan merupakan salah satu eksportir rokok kretek terbesar ke pasar internasional (Amerika Serikat, Jepang, dll.).
- **Curita Bisnis Non-Rokok (Grup Djarum)**
 - **Sektor Finansial:** Pemegang saham pengendali di PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), bank swasta terbesar di Indonesia.
 - **Sektor Digital & Ritel:** Menaungi ekosistem Bilibli, Tiket.com, dan Ranch Market di bawah bendera PT Global Digital Niaga Tbk (BELI).
 - **Sektor Telekomunikasi:** Menguasai penyewaan menara seluler melalui PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR).
 - **Sektor Manufaktur:** Memiliki merek elektronik lokal Polytron (audio, visual, perlengkapan rumah tangga, hingga motor listrik).
 - **Sosial & Olahraga:** Aktif dalam pembinaan atlet bulu tangkis dunia melalui PB Djarum dan pelestarian lingkungan via Djarum Trees for Life.



persen secara tahunan dan memenuhi 63 persen dari target Rp49,9 triliun. Kenaikan ini ditopang peningkatan impor dan pengaruh kurs. Sementara itu, bea keluar mencapai Rp20,4 triliun, tumbuh 26,3 persen, tetapi baru memenuhi 47,9 persen dari target Rp42,5 triliun. Kinerjanya didorong penguatan harga minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan kenaikan volume ekspor.

Tekanan penerimaan cukai diperkirakan berlanjut pada 2027. Mengacu pada Buku II Nota Keuangan dan RAPBN 2027, penerimaan cukai diproyeksikan sebesar Rp235,26 triliun, hanya tumbuh 0,4 persen dibandingkan outlook 2026 sebesar Rp234,4 triliun. Proyeksi ini menunjukkanmu terbatasnya ruang pertumbuhan penerimaan negara dari sektor cukai.(wid,rls,dtc,ant/dya)

Malaysia Protes Karhutla Indonesia

BANTAH PERUSAHAAN SAWITNYA TERLIBAT, BAKAL TUNTUT KOMPENSASI

Pemerintah Malaysia membantah perusahaan perkebunan yang terafiliasi dengan negara itu terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Bantahan tersebut muncul setelah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengungkap dugaan keterkaitan 21 perusahaan dengan kelompok bisnis Malaysia dalam kebakaran yang terjadi sepanjang 2026. Di tengah kabut asap yang melintasi perbatasan, Kuala Lumpur juga mempertimbangkan kemungkinan menuntut kompensasi kepada Indonesia atas dampak pencemaran udara.

Menteri Sumber Daya Alam dan Kelestarian Lingkungan Malaysia, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup, mengatakan belum ada bukti konklusif yang menunjukkan perusahaan perkebunan terkait Malaysia bertanggung jawab atas kebakaran tersebut. Pernyataan itu disampaikan dalam pembahasan penutup anggaran kementeriaannya untuk 2027 di Dewan Rakyat, Rabu (28/10/2026).

"Berdasarkan tinjauan sejauh ini, tidak ada bukti konklusif bahwa perusahaan perkebunan yang memiliki keterkaitan dengan Malaysia bertanggung jawab atas kebakaran tersebut," kata Kurup, sebagaimana dikutip dari The Star.

Kurup mengatakan kementeriaannya telah menelaah persoalan tersebut bersama Kementerian Perkebunan dan Komoditas Malaysia. Pemerintah, menurut dia, juga perlu memeriksa lebih lanjut usulan pembatasan pendanaan bagi perusahaan yang



Pusat Kota Kuala Lumpur, dengan Menara Kembar Petronas yang ikonik tampak samar dan sebagian tertutup kabut asap, pada 16 Oktober.dok

terbukti bertanggung jawab atas kebakaran.

Pemeriksaan itu mencakup dasar hukum, standar pembuktian, yurisdiksi, serta implikasi kebijakan terhadap sektor keuangan. Dengan demikian, pemerintah Malaysia belum menyatakan perusahaan-perusahaan yang dikaitkan dengan negaranya terbukti bersalah, tetapi juga belum

menutup kemungkinan penerapan langkah tertentu apabila tanggung jawab korporasi dapat dibuktikan.

Bantahan serupa disampaikan Menteri Perkebunan dan Komoditas Malaysia, Datuk Seri Dr Noraini Ahmad. Mengutip laporan Harian Metro Malaysia, Kompas.com melaporkan pada Rabu (28/10) bahwa Noraini menyatakan

pemantauan Dewan Minyak Sawit Malaysia (MPOB) sejauh ini tidak menemukan kebakaran yang bermula dari perkebunan milik perusahaan Malaysia yang dimaksud.

"Berdasarkan laporan yang kami terima, tidak ada pembakaran terbuka. Kami melakukan pemantauan dan perusahaan juga tunduk pada standar RSPO," kata Noraini, sebagaimana dikutip Kompas.com.

RSPO atau Roundtable on Sustainable Palm Oil merupakan sistem sertifikasi internasional untuk produksi minyak sawit berkelanjutan. Noraini juga menyebut perusahaan perkebunan Malaysia wajib mematuhi sertifikasi Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO), yang melarang praktik pembakaran terbuka.

Ia mengatakan pemerintah perlu memastikan terlebih dahulu perusahaan mana yang dituding melakukan pembakaran. Berdasarkan pemantauan MPOB, api disebut tidak berasal dari perkebunan yang dimaksud.(gus,ist,kim/dya)

SINGAPURA PANGGIL 8 BOS PERUSAHAAN TERKAIT KEBAKARAN HUTAN

Pemerintah Singapura memperketat penyelidikan terhadap perusahaan perkebunan kelapa sawit dan kehutanan yang diduga memiliki keterkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Delapan pimpinan kelompok usaha memenuhi panggilan tiga pejabat tinggi Singapura pada Rabu (28/10/2026) dan menyatakan bersedia bekerja sama dalam penyelidikan yang menyangkut operasi bisnis, hubungan korporasi, hingga rantai pasok mereka.

PERTEMUAN tersebut dihadiri Wakil Perdana Menteri Singapura Gan Kim Yong, Menteri Dalam Negeri K. Shanmugam, serta Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Grace Fu. Mereka didampingi Penasihat Senior Davinder Singh dan sejumlah pejabat dari Kejaksaan Agung, Badan Lingkungan Nasional (National Environment Agency/NEA), serta Kementerian Hukum.

Delapan kelompok usaha yang hadir ialah Bumitama Agri, First Resources, Golden Agri-Resources, Indofood Agri Resources, Kencana Agri, TSH Resources, Wilmar International, dan Sinar Mas Group.

Golden Agri-Resources dan Sinar Mas juga mewakili kepentingan terkait Asia Pulp & Paper (APP). Sementara itu, pemberitahuan resmi yang menjadi dasar penyelidikan telah ditujukan kepada 10 perusahaan berbasis di Singapura.

Pemerintah Singapura menegaskan akan menggunakan instrumen hukum yang tersedia untuk mengungkap keterkaitan perusahaan dengan kebakaran yang menyebabkan kabut asap lintas batas. Salah satu langkah yang disiapkan adalah mengamendemen Undang-Undang Pencemaran Kabut Asap Lintas Batas (Transboundary Haze Pollution

Act/THPA) agar kewajiban menjalani penilaian independen dan bekerja sama dengan penyelidik memiliki kekuatan hukum yang lebih tegas.

"Kami akan mengajukan amendemen terhadap Undang-Undang Pencemaran Kabut Asap Lintas Batas pada sidang parlemen berikutnya untuk memberikan kekuatan hukum pada kerangka ini. Perusahaan yang tidak mematuhi akan melakukan pelanggaran hukum. Kami akan menggunakan kewenangan kami untuk melindungi kesehatan masyarakat Singapura," kata Grace Fu, dikutip Channel NewsAsia.

Menteri Dalam Negeri Singapura

K. Shanmugam mengatakan perusahaan-perusahaan tersebut diharapkan menjalani penilaian independen secara menyeluruh. Pemeriksaan tidak hanya menasar aktivitas operasional di lapangan, tetapi juga hubungan antarbadan usaha dan rantai pasok yang memungkinkan keterlibatan perusahaan ditelusuri hingga ke kelompok usaha induknya.

Pemeriksaan akan dilakukan oleh panel penilai khusus dan firma hukum independen di bawah arahan NEA. Biaya penilaian dibebankan kepada perusahaan yang diperiksa.(wid,ist,ktn/dya)